BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data metode kuantitatif berupa kuisioner yang disebarkan dan mengambil sampel 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandar Lampung Satu yang berlokasi di Jl. Dokter Susilo No. 19, KPP Pratama Bandar Lampung Dua yang berlokasi di Jl. Dokter Susilo No. 41, dan KPP Madya Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. M.Noer No. 5A Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini terdapat variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan variabel X yaitu Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1), Kebijakan Insentif Pajak (X2), dan Manfaat Pajak (X3). Adapun rincian hasil penyebaran kuesioner kepada responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
1	Distribusi Kuisioner	100	100%
2	Kuisioner tidak diisi/ kurang isi	0	0%
3	Kuisioner diolah	100	100 %
	Jumlah Sampel: 100		

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Dari 100 kuisioner yang disebar, jumlah kuisioner yang telah diisi oleh responden sejumlah 100. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *responden rate* sebesar 100 persen. Selanjutnya sajian informasi mengenai deskripsi responden disajikan sebagai berikut.

4.1.1 Karakteristik Responden

Pada bagian ini peneliti menunjukkan rincian deskripsi responden penelitian. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden penelitian. Karekteristik responden penelitian ini telah disesuaikan dengan variabel dependen yang diteliti yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu peneliti menyajikan informasi mengenai data statistik pekerjaan dan usia responden, yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Karyawan Swasta	47	47 %
ASN (Aktif)	32	32 %
Wirausaha	18	18 %
Teknisi	1	1%
Konsultan	2	2 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpenghasilan tetap sebesar 82 persen, nilai tersebut hasil penjumlahan dari persentase pengawai swasta, ASN, teknisi dan konsultan. Sedangkan jumlah responden yang berpenghasilan tidak tetap sebesar 18 persen. Untuk deskripsi data berdasarkan berdasarkan usia disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 30 tahun	38	38 %
30 – 50 tahun	52	52 %
> 50 tahun	10	10 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 4.3 menunjukkan responden terbesar berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan usia antara 30 sampai 50 tahun dengan jumlah 52 orang atau 52 persen. Responden lainnya berusia kurang dari 30 tahun sejumlah 38 orang atau 38 persen

dan jumlah responden terendah berusia lebih dari 50 tahun dengan 10 orang atau 10 persen. Rendahnya jumlah responden berusia lebih dari 50 tahun dikarenakan pada usia tersebut sejumlah orang sudah tidak produktif seperti usia sebelumnya.

4.2 Hasil Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data dan uji statistik deskriptif, maka diperoleh hasil data sebagai berikut :

4.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimu	Maximu	Mean	Std.
		m	m		Deviation
Kepatuhan Wajib	100	1	5	4,21	,636
Pajak Orang Pribadi					
Kepercayaan Kepada	100	1	5	3,97	,745
Pemerintah					
Kebijakan Insentif	100	1	5	3,83	,675
Pajak					
Manfaat Pajak	100	1	5	3,69	,557
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah , 2022

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.4 diketahui bahwa jumlah data untuk semua variabel adalah sebanyak 100 dengan menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1= Sangat tidak setuju, 2= Tidak setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, 5 = sangat setuju. Berikut penjelasan tabel statistik deskriptif:

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa penelitian ini menggunakan sampel
 (N) sebanyak 100 responden. Dengan variabel kepatuhan wajib pajak

- orang pribadi (Y) menunjukkan nilai minimum 1 dan nilai maximum 5. Dengan nilai rata-rata yaitu 4,21 dengan standar deviasi sebesar 0,636.
- Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1) menunjukkan nilai minimum 1 dan dan nilai maximum 5. Dengan nilai rata-rata sebesar 3,97 dan standar deviasi sebesar 0,745.
- 3. Variabel Kebijakan Insentif Pajak (X2) menunjukkan nilai minimum 1 dan dan nilai maximum 5. Dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 dan standar deviasi sebesar 0,675.
- 4. Variabel Manfaat Pajak (X3) menunjukkan nilai minimum 1 dan dan nilai maximum 5. Dengan nilai rata-rata sebesar 3,69 dan standar deviasi sebesar 0,557.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Apabila hasil yang diperoleh r^{hitung} > r^{tabel} maka item pernyataan dikatakan valid, namun jika nilai p-value (sig) < maka item pernyataan dinyatakan tidak valid. Untuk mendapatkan nilai r^{tabel} diperoleh dari tabel r product moment pada tingkat signifikansi sebesar (0,05) dengan derajat kebebasan (df= N-2). Maka diperoleh hasil data sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig	Kondisi	Keterangan
			(2-		
			tailed)		
Item 1	0,873	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 2	0,733	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 3	0,866	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Item 4	0,819	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 5	0,814	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas diketahui bahwa setiap item pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak pribadi memiliki nilai Signifikansi (Sig) dibawah 0,05 dan nilai r-hitung ≥ dari r-tabel sehingga diperoleh hasil bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner adalah valid. Sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Kepercayaan Kepada Pemerintah

Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig	Kondisi	Keterang
			(2-tailed)		an
Item 1	0,888	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 2	0,869	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 3	0,886	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 4	0,858	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 5	0,833	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas diketahui bahwa setiap item pertanyaan tentang Kepercayaan Kepada Pemerintah memiliki nilai Signifikansi (Sig) dibawah 0,05 dan nilai r-hitung ≥ dari r-tabel sehingga diperoleh hasil bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner adalah valid. Sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kebijakan Insentif Pajak

Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig	Kondisi	Keterangan
			(2-tailed)		

Item 1	0,788	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 2	0,739	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 3	0,730	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 4	0,854	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 5	0,795	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 6	0,780	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas diketahui bahwa setiap item pertanyaan tentang Kebijakan Insentif Pajak memiliki nilai Signifikansi (Sig) dibawah 0,05 dan nilai r-hitung ≥ dari r-tabel sehingga diperoleh hasil bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner adalah valid. Sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Manfaat Pajak

Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig	Kondisi	Keterangan
			(2-tailed)		
Item 1	0,706	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 2	0,818	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 3	0,681	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 4	0,587	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 5	0,505	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas diketahui bahwa setiap item pertanyaan tentang Manfaat Pajak memiliki nilai Signifikansi (Sig) dibawah 0,05 dan nilai r-hitung ≥ dari r-tabel sehingga diperoleh hasil bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner adalah valid. Sehingga layak digunakan dalam penelitian.

4.3.2Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika

jawaban responden terhadap peryataan adalah konsisten. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan SPSS 21 Jika suatu kuesioner memiliki koefisien reliabilitas Cronbach Alpha > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliabel, sehingga layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji reliabilitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai	Batas	Keterangan
		Cronbach's	Reliabilitas	
		Alpha		
1	Kepatuhan Wajib	0,876	0,60	Reliabel
	Pajak Orang Pribadi			
2	Kepercayaan Kepada	0,917	0,60	Reliabel
	Pemerintah			
3	Kebijakan Insentif	0,872	0,60	Reliabel
	Pajak			
4	Manfaat Pajak	0,681	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan data hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.9 diatas diketahui bahwa pada masing-masing variabel: Kepercayaaan Kepada Pemerintah (X1), Kebijakan Insentif Pajak (X2), Manfaat Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat masalah asumsi klasik maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih terdapat adanya

masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah revisi model untuk menghilangkan masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan berikut ini:

4.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali *dalam* (Lestari , 2011) Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Ada dua cara yang dilakukan untuk mengetahui variabel berdistribusi normal atau tidak yaitu, analisis grafik dan uji statistik.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov–Smirnov (KS). Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka angka yang lebih detail agar dapat menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dalam data – data yang digunakan (Ghozali, 2011). Dalam uji Kolmogorov–Smirnov, suatu data dikatakan normal jika nilai asymptotic significance lebih dari 0,05 (Ghozali, 2011). Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample	Kolmogorov-	Smirnov	Test
------------	-------------	---------	-------------

		Unstandardiz
		ed Residual
N		100
	Mean	,0000000
Normal Parameters ^{a,b}	Std.	2,36536557
	Deviation	
Most Extreme	Absolute	,094
Differences	Positive	,062
Differences	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z	,935	

Asymp. Sig. (2-tailed) ,346

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk semua variabel lebih besar dari 0,05, yaitu 0,346, maka sesuai pernyataan (Duwi Prayitno, 2010) dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas ini untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standard	T	Sig.	Collin	earity
		Coeffi	cients	ized			Stati	stics
				Coeffici				
				ents				
		В	Std.	Beta			Tolera	VIF
			Error				nce	
	(Constant)	9,073	1,817		4,993	,000		
	Kepercayaan	,580	,092	,679	6,311	,000	,497	2,014
	Kepada							
1	Pemerintah							
	Kebijakan	-,073	,082	-,093	-,883	,379	,521	1,918
	Insentif Pajak							
	Manfaat Pajak	,116	,097	,101	1,187	,238	,791	1,265

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

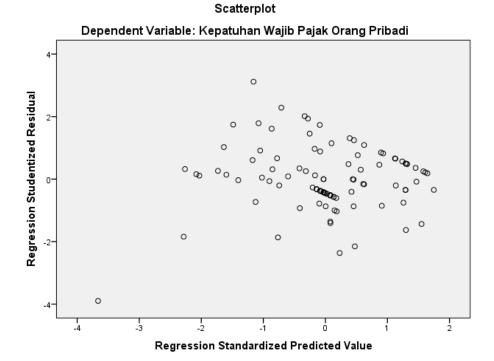
Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diketahui bahwa *tolerance value* variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak adalah 0,497, 0,521 dan 0,791, dimana nilai tersebut \geq 0,1 dan nilai VIF variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak adalah 2,014, 1,918, dan 1,265 dimana \leq 10. Sehingga diperoleh hasil bahwa dalam model regresi tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Priyatno, 2011). Jika *variance* dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas dari residual satu ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2011).

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *scatterplot*, dengan mengamati pola titik-titiknya. Jika titik-titik pada *scatterplot* menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan SPSS 21 disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.2. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot

Berdasarkan gambar 4.2 diatas diketahui bahwa penyebaran titik-titik *scatterplot* secara acak atau tidak beraturan diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka diperoleh hasil bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel *bebas* (independen) terhadap variabel terikat (Ghazali, 2009) Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3x3$$

Hasil uji regresi linier berganda menggunakan SPSS 21 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Mo	del	Unstandardized		Standard	t	Sig.	Collin	earity
		Coeffi	cients	ized			Stati	stics
				Coeffici				
				ents				
		В	Std.	Beta			Tolera	VIF
			Error				nce	
	(Constant)	9,073	1,817		4,993	,000		
	Kepercayaan	,580	,092	,679	6,311	,000	,497	2,014
	Kepada							
1	Pemerintah							
	Kebijakan	-,073	,082	-,093	-,883	,379	,521	1,918
	Insentif Pajak							
	Manfaat Pajak	,116	,097	,101	1,187	,238	,791	1,265

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, menunjukkan hasil diperoleh nilai constant atau sebesar 9,073 dan koefisien regresi dari setiap variabel independent diperoleh masing masing $\beta = 0,580$, $\beta = -0,073$, dan $\beta = 0,116$. Dari nilai constant dan koefisien regresi dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3x3 + e$$

$$Y = 9,073 + 0,580(X1) + -0,073(X2) + 0,116(X3) + e$$

- Nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 9,073, yang artinya jika variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak bernilai nol maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 9,073.
- Koefisien regresi variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah menunjukkan nilai 0,580, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam Kepercayaan kepada pemerintah, maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,580.

- 3. Koefisien regresi variabel Kebijakan Insentif Pajak menunjukkan nilai 0,073, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam Kebijakan Insentif Pajak akan menurunkan (-) nilai Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sebesar 0,073.
- 4. Koefisien regresi variabel Manfaat Pajak menunjukkan nilai 0,116, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam Manfaat Pajak, maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,116.

4.6 Uji Hipotesis

4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama–sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *R Square*. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependennya. Nilai koefisen determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1 diangkap masingmasing variabel dalam penelitian ini mampu secara akurat atau mendekati keseluruhan fenomena atau permasalahan yang ada dalam variabel dependennya. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of	Durbin-
1			Square	the Estimate	Watson
1	,669ª	,447	,430	2,402	1,683

a. Predictors: (Constant), Manfaat Pajak, Kebijakan Insentif Pajak,

Kepercayaan Kepada Pemerintah

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Sugiyono (2012) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0.00 - 0.199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0.60 - 0.799 = tinggi

0.80 - 1.000 = sangat tinggi

Dari hasil olah data (output) diperoleh nilai Koefisien korelasi (R) sebesar 0,669 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang masuk kategori tinggi antara Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandar Lampung. Dan dilihat dari nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,447 atau 44,7 % maka dapat dikatakan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 44,7% sedangkan sisanya sebesar 55,3 % dipengaruhi variabel lain atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.5.2 Hasil Uji F

Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh vaiabel-variabel bebas secara bersamasama terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ atau nilai F-hitung \geq F-tabel maka secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ atau nilai F-hitung \leq F-tabel maka secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menentukan F-tabel digunakan persamaan: (k;N-k) dengan keterangan; k adalah variabel independen, N adalah jumlah sampel. Sehingga diperoleh persamaan:

=(3;100-3)

= (3 ; 97), dengan merujuk pada tabel distribusi F sehingga diperoleh F-tabel sebesar 2,70

Hasil uji F menggunakan SPSS 21 disajikan sebagai berikut:

Tabel. 4.14 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model Sum of Df Mean F Sig. Squares Square $,000^{b}$ Regression 448,610 3 149,537 25,917 Residual 553,900 96 5,770 Total 1002,510 99

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Manfaat Pajak, Kebijakan Insentif Pajak,

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, yang berarti ≤ dari 0,05 dan nilai F-hitung sebesar 25,917 yang berarti ≥ dari F tabel (2,70). Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wilayah Bandar Lampung.

4.5.3 Hasil Uji T

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Apakah Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, Manfaat Pajak berpengaruh signifikan atau tidak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk mengetahui signifikan dari masing-masing variabel, maka terdapat pengambilan keputusan:

 Jika signifikan (sig) < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti model layak digunakan dalam penelitian ini. Begitupun sebaliknya, jika sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Tabel 4.15 Hasil Uji T

Coefficients^a

Mo	Model Unstandardized		Standar	t	Sig.	Collin	earity	
		Coeffi	cients	dized			Statis	stics
				Coeffici				
				ents				
		В	Std.	Beta			Toler	VIF
			Error				ance	
	(Constant)	9,073	1,817		4,99	,000		
	(Constant)				3			
	Kepercayaan	,580	,092	,679	6,31	,000	,497	2,01
1	Kepada Pemerintah				1			4
1	Kebijakan Insentif	-,073	,082	-,093	-,883	,379	,521	1,91
	Pajak							8
	Monfoot Doials	,116	,097	,101	1,18	,238	,791	1,26
	Manfaat Pajak				7			5

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

 H1: Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis variabel pertama menunjukkan bahwa nilai sig 0,000 yang berarti < 0,05 Maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. H2 : Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis variabel kedua menunjukkan bahwa nilai sig 0,379 yang berarti > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

3. H3: Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis variabel ketiga menunjukkan bahwa nilai sig 0,238 yang berarti > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Manfaat Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Gambaran Umum Penelitian

Penurunan penerimaan pajak tahun 2020 tak lepas dari dampak Pandemi covid19. Berdasarkan data yang diambil dari KPP Pratama Balam Satu, KPP Pratama
Balam Dua, dan KPP Madya Bandar Lampung ditemukan pola yang serupa yaitu
jumlah netto atau penerimaan pajak masing masing KPP tidak memenuhi target
dari tahun 2019-2020. Selain itu, terjadi penurunan persentase pertumbahan
setoran wajib pajak orang pribadi dari tahun 2019-2020. Kondisi jumlah netto
atau penerimaan pajak dan persentase pertumbuhan paling parah terjadi selama
tahun 2020 (masa pandemi). Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan
penerimaan atau netto dan persentase yang cukup meningkat hal ini karena pada
tahun tersebut kondisi ekonomi mulai membaik dan beberapa program pemerintah
seperti vaksin dan bantuan sosial telah diterima oleh masyarakat.

Hal ini karena pada tahun tersebut terjadi pelemahan sektor ekonomi mikro seperti penurunan penghasilan UMKM, beberapa karyawan mendapat PHK secara

sepihak dari perusahaan serta naiknya kebutuhan harga pokok menjadikan pengasilan dan daya *saving* wajib pajak orang pribadi mulai menurun. Dampak dari peristiwa ini ialah masyarakat meragukan kemampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah telah meluncurkan program insentif pajak demi meringankan beban wajib pajak selama pandemi, namun salah satu persyaratan wajib pajak mendapat insentif pajak tersebut ialah memiliki penghasilan tetap.

Masalah selanjutnya yang menjadikan penerimaan pajak menurun ialah kurangnya komunikasi pemerintah daerah maupun KPP Bandar lampung tentang pentingnya manfaat pajak demi kesejahteraan umum. Sehingga masyarakat hanya menganggap bahwa membayar pajak sama halnya dengan pemerintah memalak dana dari masyarakat. Oleh karena itu peneliti berusaha menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Bandar Lampung dalam membayar pajak. Sehingga variabel independen yang diujikan dalam penelitian ini adalah kepercayaan kepada pemerintah, insentif pajak dan manfaat pajak. Adapun hasil pengujian masing-masing variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.6.2 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji tabel 4.13 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) variabel kepercayaan kepada pemerintah sebesar 0,000, yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak, maka dapat diperoleh hasil bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Saputri (2019) di kota Surakarta bahwa kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak orang pribadi, yang berarti apabila Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abadan dan Baridwan (2014) yang menyebutkan bahwa kepercaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap integritas, pelayanan, konsistensi dan transparansi yang ditunjukkan oleh otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Begitu juga hasil penelitian oleh Dewi (2019) di kota Tarakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan kepercayaan kepada pemerintah dan kebanggaan nasional, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian lain, dengan indikator yang sama, Kastlunger et al. 2013 menemukan bukti empiris bahwa kekuasaan yang legitimasi memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepercayaan wajib terhadap kepatuhan sukarela. Lebih lanjut Hofmann et al. (2014) dan Gangl, et al. (2015) menemukan hasil bahwa kekuasaan legitemasi berpengaruh pada kepatuhan pajak yang didasarkan pada kepercayaan, kerjasama sukarela dan iklim layanan yang di sediakan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa kekuasaan legitimasi berpengaruh pada kepatuhan sukarela wajib pajak. Jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik, maka keinginan wajib pajak untuk patuh juga akan bertambah (Gultom, 2016). Sehingga dapat dibuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi.

4.6.3 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) variabel insentif pajak sebesar 0,379 yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima ,sehingga dapat diperoleh hasil bahwa Variabel insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 100 wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Bandar Lampung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Dewi, Widyasari, dan Nataherwin, 2020) bahwa pemberian insentif pajak selama pandemi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian menyanggah hasil penelitian terdahulu oleh Alfina dan Diana (2021)

bahwa variabel insentif perpajakan akibat Covid-19 (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (Y) dikarenakan masyarakat kota Malang telah sadar untuk mengambil manfaat dari insentif pajak tersebut.

Insentif pajak adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak — wajib pajak Indonesia di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bentuk insentif yang diberikan yaitu berupa keringanan PPh 21 yang akan ditanggung pemerintah (DTP) dengan ketentuan untuk pegawai dengan penghasilan bruto dibawah 200 juta per tahun. Namun kebijakan tersebut dirasa kurang efektif oleh masyarakat, karena hanya menjangkau golongan pegawai atau pihak yang berpenghasilan tetap.

Hal ini dibuktikan dengan data status pekerjaan utama di Bandar Lampung menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 yaitu pada Februari 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 3,17 juta orang (71,96 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 1,24 juta orang (28,04 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Februari 2021 naik sebesar 2,46 persen poin jika dibandingkan Februari 2020, tetapi apabila dibandingkan Agustus 2020 pekerja informal turun sebesar 0,30 persen poin.

Selain itu rendahnya komunikasi KPP setempat menjadikan beberapa informasi mengenai insentif pajak tidak tersampai pada wajib pajak yang sebenarnya telah memenuhi kualifikasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya program komunikasi persuasi dari KPP setempat untuk memberitahukan informasi tentang insentif pajak. Padahal komunikasi yang baik sering dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas informasi. Kualitas informasi cenderung dapat dilihat dari akurasi, ketepatan waktu, dan kegunaannya. Penelitian oleh (Siahaan, 2012) menunjukkan bahwa kualitas informasi sangat terkait dengan kepercayaan. Sehingga Wajib pajak akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi apabila mereka percaya bahwa informasi yang mereka terima sangat akurat, tepat waktu, dan berguna bagi mereka.

Faktor lain yang menjadikan hasil penelitian ini menolak pengaruh insentif pajak dengan kepatuhan wajib orang pribadi pajak yaitu selama pandemi ini,

perekenomian masyarakat bandar Lampung semakin menurun, dengan adanya pemberian insentif, dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi belum tentu sejalan dengan mulus dan lancar, karena ada kendala seperti menurunnya daya beli, serta perubahan pola *spending-saving* dalam masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

Apabila daya beli menurun, maka permintaa juga menurun. Selain itu dampak terberat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan penghasilan dari masyarakat berpenghasilan menengah dan menengah ke bawah menurun, dan juga adanya pemutusan hubungan kerja dari beberapa perusahaan sehingga wajib pajak merasa untuk tidak perlu membayar pajak meski mendapat keringanan insentif pajak. Sehingga dapat dibuktikan bahwa pemberian insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi.

4.6.4 Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) variabel insentif pajak sebesar 0,238, yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima ,sehingga dapat diperoleh hasil bahwa Variabel manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 100 wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Bandar Lampung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Masruroh dan Zulaikha ditolak yaitu manfaat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Namun hasil penelitian menyanggah hasil penelitian terdahulu oleh (Latief et al., 2020) bahwa manfaat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Wibowo, 2018). Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat yang berasal dari penyediaan barang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik yang memadai (Anugrah, 2018).

Sedangkan hasil survei oleh Wibowo (2018) pada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak menyebutkan delapan penyebab, tiga diantaranya terkait dengan kepercayaan kepada pemerintah/fiskus. Tiga penyebab itu adalah: "karena mereka mencuri uang saya; karena jika mereka menangkap saya, maka saya dapat menyelesaikannya dan walaupun saya tidak membayar, tidak akan terjadi apa-apa". Hasil survei diatas memiliki indikasi bahwa mereka tidak memahami manfaat pajak guna membentuk kesejahteraan sosial. Salah satu penyebab wajib pajak yang tidak memahami manfaat pajak dikarenakan kurangnya promosi media sosial maupun komunikasi persuasi dari KPP setempat. Sehingga dapat dibuktikan bahwa manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data metode kuantitatif berupa kuisioner yang disebarkan dan mengambil sampel 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandar Lampung Satu yang berlokasi di Jl. Dokter Susilo No. 19, KPP Pratama Bandar Lampung Dua yang berlokasi di Jl. Dokter Susilo No. 41, dan KPP Madya Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. M.Noer No. 5A Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini terdapat variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi dan variabel X yaitu Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1), Kebijakan Insentif Pajak (X2), dan Manfaat Pajak (X3). Adapun rincian hasil penyebaran kuesioner kepada responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
1	Distribusi Kuisioner	100	100%
2	Kuisioner tidak diisi/ kurang isi	0	0%
3	Kuisioner diolah	100	100 %
	Jumlah Sampel: 100		

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Dari 100 kuisioner yang disebar, jumlah kuisioner yang telah diisi oleh responden sejumlah 100. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *responden rate* sebesar 100 persen. Selanjutnya sajian informasi mengenai deskripsi responden disajikan sebagai berikut.

4.1.1 Karakteristik Responden

Pada bagian ini peneliti menunjukkan rincian deskripsi responden penelitian. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden penelitian. Karekteristik responden penelitian ini telah disesuaikan dengan variabel dependen yang diteliti yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu peneliti menyajikan informasi mengenai data statistik pekerjaan dan usia responden, yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Karyawan Swasta	47	47 %
ASN (Aktif)	32	32 %
Wirausaha	18	18 %
Teknisi	1	1%

Konsultan	2	2 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpenghasilan tetap sebesar 82 persen, nilai tersebut hasil penjumlahan dari persentase pengawai swasta, ASN, teknisi dan konsultan. Sedangkan jumlah responden yang berpenghasilan tidak tetap sebesar 18 persen. Untuk deskripsi data berdasarkan berdasarkan usia disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 30 tahun	38	38 %
30 – 50 tahun	52	52 %
> 50 tahun	10	10 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 4.3 menunjukkan responden terbesar berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan usia antara 30 sampai 50 tahun dengan jumlah 52 orang atau 52 persen. Responden lainnya berusia kurang dari 30 tahun sejumlah 38 orang atau 38 persen dan jumlah responden terendah berusia lebih dari 50 tahun dengan 10 orang atau 10 persen. Rendahnya jumlah responden berusia lebih dari 50 tahun dikarenakan pada usia tersebut sejumlah orang sudah tidak produktif seperti usia sebelumnya.

4.2 Hasil Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data dan uji statistik deskriptif, maka diperoleh hasil data sebagai berikut :

4.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.4

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimu	Maximu	Mean	Std.
		m	m		Deviation
Kepatuhan Wajib	100	1	5	4,21	,636
Pajak Orang Pribadi					
Kepercayaan Kepada	100	1	5	3,97	,745
Pemerintah					
Kebijakan Insentif	100	1	5	3,83	,675
Pajak					
Manfaat Pajak	100	1	5	3,69	,557
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.4 diketahui bahwa jumlah data untuk semua variabel adalah sebanyak 100 dengan menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1= Sangat tidak setuju, 2= Tidak setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, 5 = sangat setuju. Berikut penjelasan tabel statistik deskriptif:

- 5. Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa penelitian ini menggunakan sampel (N) sebanyak 100 responden. Dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) menunjukkan nilai minimum 1 dan nilai maximum 5. Dengan nilai rata-rata yaitu 4,21 dengan standar deviasi sebesar 0,636.
- 6. Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1) menunjukkan nilai minimum 1 dan dan nilai maximum 5. Dengan nilai rata-rata sebesar 3,97 dan standar deviasi sebesar 0,745.
- 7. Variabel Kebijakan Insentif Pajak (X2) menunjukkan nilai minimum 1 dan dan nilai maximum 5. Dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 dan standar deviasi sebesar 0,675.
- 8. Variabel Manfaat Pajak (X3) menunjukkan nilai minimum 1 dan dan nilai maximum 5. Dengan nilai rata-rata sebesar 3,69 dan standar deviasi sebesar 0,557.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Apabila hasil yang diperoleh r^{hitung} > r^{tabel} maka item pernyataan dikatakan valid, namun jika nilai p-value (sig) < maka item pernyataan dinyatakan tidak valid. Untuk mendapatkan nilai r^{tabel} diperoleh dari tabel r product moment pada tingkat signifikansi sebesar (0,05) dengan derajat kebebasan (df= N-2). Maka diperoleh hasil data sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig Kondisi		Keterangan
			(2-		
			tailed)		
Item 1	0,873	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 2	0,733	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 3	0,866	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 4	0,819	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 5	0,814	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas diketahui bahwa setiap item pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak pribadi memiliki nilai Signifikansi (Sig) dibawah 0,05 dan nilai r-hitung ≥ dari r-tabel sehingga diperoleh hasil bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner adalah valid. Sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kepercayaan Kepada Pemerintah

Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig Kondisi		Keterang
			(2-tailed)		an
Item 1	0,888	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 2	0,869	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 3	0,886	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 4	0,858	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 5	0,833	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas diketahui bahwa setiap item pertanyaan tentang Kepercayaan Kepada Pemerintah memiliki nilai Signifikansi (Sig) dibawah 0,05 dan nilai r-hitung ≥ dari r-tabel sehingga diperoleh hasil bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner adalah valid. Sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kebijakan Insentif Pajak

Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig	Kondisi	Keterangan
			(2-tailed)		
Item 1	0,788	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 2	0,739	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 3	0,730	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 4	0,854	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 5	0,795	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 6	0,780	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas diketahui bahwa setiap item pertanyaan tentang Kebijakan Insentif Pajak memiliki nilai Signifikansi (Sig) dibawah 0,05 dan nilai r-hitung ≥ dari r-tabel sehingga diperoleh hasil bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner adalah valid. Sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Manfaat Pajak

Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig Kondisi		Keterangan
			(2-tailed)		
Item 1	0,706	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 2	0,818	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 3	0,681	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 4	0,587	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Item 5	0,505	0,1966	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas diketahui bahwa setiap item pertanyaan tentang Manfaat Pajak memiliki nilai Signifikansi (Sig) dibawah 0,05 dan nilai r-hitung ≥ dari r-tabel sehingga diperoleh hasil bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner adalah valid. Sehingga layak digunakan dalam penelitian.

4.3.2Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap peryataan adalah konsisten. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan SPSS 21 Jika suatu kuesioner memiliki koefisien reliabilitas Cronbach Alpha > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliabel, sehingga layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji reliabilitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai	Batas	Keterangan
		Cronbach's	Reliabilitas	
		Alpha		
1	Kepatuhan Wajib	0,876	0,60	Reliabel
	Pajak Orang Pribadi			
2	Kepercayaan Kepada	0,917	0,60	Reliabel
	Pemerintah			
3	Kebijakan Insentif	0,872	0,60	Reliabel
	Pajak			
4	Manfaat Pajak	0,681	0,60	Reliabel

Berdasarkan data hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.9 diatas diketahui bahwa pada masing-masing variabel: Kepercayaaan Kepada Pemerintah (X1), Kebijakan Insentif Pajak (X2), Manfaat Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat masalah asumsi klasik maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih terdapat adanya masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah revisi model untuk menghilangkan masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan berikut ini:

4.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali *dalam* (Lestari , 2011) Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Ada dua cara yang dilakukan untuk mengetahui variabel berdistribusi normal atau tidak yaitu, analisis grafik dan uji statistik.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov–Smirnov (KS). Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka angka yang lebih detail agar dapat menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dalam data – data yang digunakan (Ghozali, 2011). Dalam uji Kolmogorov–Smirnov, suatu data dikatakan normal jika nilai asymptotic significance lebih dari 0,05 (Ghozali, 2011). Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardiz
		ed Residual
N		100
	Mean	,0000000
Normal Parameters ^{a,b}	Std.	2,36536557
	Deviation	
Mark Estudio	Absolute	,094
Most Extreme	Positive	,062
Differences	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z	,935	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,346

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk semua variabel lebih besar dari 0,05, yaitu 0,346, maka sesuai pernyataan (Duwi Prayitno, 2010) dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

b. Calculated from data.

Uji Multikolinieritas ini untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standard	T	Sig.	Collin	earity
		Coeffi	cients	ized			Stati	stics
				Coeffici				
				ents				
		В	Std.	Beta			Tolera	VIF
			Error				nce	
	(Constant)	9,073	1,817		4,993	,000		
	Kepercayaan	,580	,092	,679	6,311	,000	,497	2,014
	Kepada							
1	Pemerintah							
	Kebijakan	-,073	,082	-,093	-,883	,379	,521	1,918
	Insentif Pajak							
	Manfaat Pajak	,116	,097	,101	1,187	,238	,791	1,265

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

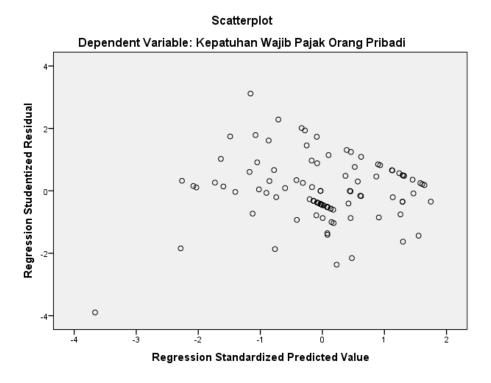
Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diketahui bahwa *tolerance value* variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak adalah 0,497, 0,521 dan 0,791, dimana nilai tersebut \geq 0,1 dan nilai VIF variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak adalah 2,014, 1,918, dan 1,265 dimana \leq 10. Sehingga diperoleh hasil bahwa dalam model regresi tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Priyatno, 2011). Jika *variance* dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas dari residual satu ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2011).

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *scatterplot*, dengan mengamati pola titik-titiknya. Jika titik-titik pada *scatterplot* menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan SPSS 21 disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.2. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan gambar 4.2 diatas diketahui bahwa penyebaran titik-titik *scatterplot* secara acak atau tidak beraturan diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka diperoleh hasil bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel *bebas* (independen) terhadap variabel terikat (Ghazali, 2009) Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3x3$$

Hasil uji regresi linier berganda menggunakan SPSS 21 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standard	t	Sig.	Collin	earity
		Coefficients		ized			Stati	stics
				Coeffici				
				ents				
		В	Std.	Beta			Tolera	VIF
			Error				nce	
	(Constant)	9,073	1,817		4,993	,000		
	Kepercayaan	,580	,092	,679	6,311	,000	,497	2,014
	Kepada							
1	Pemerintah							
	Kebijakan	-,073	,082	-,093	-,883	,379	,521	1,918
	Insentif Pajak							
	Manfaat Pajak	,116	,097	,101	1,187	,238	,791	1,265

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, menunjukkan hasil diperoleh nilai constant atau sebesar 9,073 dan koefisien regresi dari setiap variabel independent diperoleh

masing masing $\beta = 0.580$, $\beta = -0.073$, dan $\beta = 0.116$. Dari nilai constant dan koefisien regresi dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3x3 + e$$

$$Y = 9,073 + 0,580(X1) + -0,073(X2) + 0,116(X3) + e$$

- Nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 9,073, yang artinya jika variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak bernilai nol maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 9,073.
- 6. Koefisien regresi variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah menunjukkan nilai 0,580, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam Kepercayaan kepada pemerintah, maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,580.
- 7. Koefisien regresi variabel Kebijakan Insentif Pajak menunjukkan nilai 0,073, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam Kebijakan Insentif Pajak akan menurunkan (-) nilai Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sebesar 0,073.
- 8. Koefisien regresi variabel Manfaat Pajak menunjukkan nilai 0,116, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam Manfaat Pajak, maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,116.

4.6 Uji Hipotesis

4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama—sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *R Square*. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependennya. Nilai koefisen determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1 diangkap masing-

masing variabel dalam penelitian ini mampu secara akurat atau mendekati keseluruhan fenomena atau permasalahan yang ada dalam variabel dependennya. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of	Durbin-
1			Square	the Estimate	Watson
1	,669 ^a	,447	,430	2,402	1,683

a. Predictors: (Constant), Manfaat Pajak, Kebijakan Insentif Pajak,

Kepercayaan Kepada Pemerintah

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Menurut Sugiyono (2012) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0.00 - 0.199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0.40 - 0.599 = sedang

0,60 - 0,799 = tinggi

0.80 - 1.000 =sangat tinggi

Dari hasil olah data (output) diperoleh nilai Koefisien korelasi (R) sebesar 0,669 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang masuk kategori tinggi antara Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandar Lampung. Dan dilihat dari nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,447 atau 44,7 % maka dapat dikatakan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib

pajak orang pribadi sebesar 44,7% sedangkan sisanya sebesar 55,3 % dipengaruhi variabel lain atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.5.2 Hasil Uji F

Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh vaiabel-variabel bebas secara bersamasama terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ atau nilai F-hitung \geq F-tabel maka secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ atau nilai F-hitung \leq F-tabel maka secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menentukan F-tabel digunakan persamaan: (k;N-k) dengan keterangan; k adalah variabel independen, N adalah jumlah sampel. Sehingga diperoleh persamaan:

=(3;100-3)

= (3 ; 97), dengan merujuk pada tabel distribusi F sehingga diperoleh F-tabel sebesar 2,70

Hasil uji F menggunakan SPSS 21 disajikan sebagai berikut:

Tabel. 4.14 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of	Df	Mean	F	Sig.
		Squares		Square		
	Regression	448,610	3	149,537	25,917	,000 ^b
1	Residual	553,900	96	5,770		
	Total	1002,510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Manfaat Pajak, Kebijakan Insentif Pajak,

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, yang berarti ≤ dari 0,05 dan nilai F-hitung sebesar 25,917 yang berarti ≥ dari F tabel (2,70). Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wilayah Bandar Lampung.

4.5.3 Hasil Uji T

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Apakah Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, Manfaat Pajak berpengaruh signifikan atau tidak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk mengetahui signifikan dari masing-masing variabel, maka terdapat pengambilan keputusan :

 Jika signifikan (sig) < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti model layak digunakan dalam penelitian ini. Begitupun sebaliknya, jika sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Coefficients^a

Model Unstandardized		lardized	Standar	t	Sig.	Collin	earity	
		Coefficients		dized			Statis	stics
				Coeffici				
				ents				
		В	Std.	Beta			Toler	VIF
			Error				ance	
	(Constant)	9,073	1,817		4,99	,000		
1	(Constant)				3			
	Kepercayaan	,580	,092	,679	6,31	,000	,497	2,01
	Kepada Pemerintah				1			4

Kebijakan Insentif	-,073	,082	-,093	-,883	,379	,521	1,91
Pajak							8
Manfaat Pajak	,116	,097	,101	1,18	,238	,791	1,26
				7			5

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah SPSS Ver21, 2022

Tabel 4.15

Hasil Uji T

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

4. H1 : Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis variabel pertama menunjukkan bahwa nilai sig 0,000 yang berarti < 0,05 Maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

 H2: Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis variabel kedua menunjukkan bahwa nilai sig 0,379 yang berarti > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

6. H3: Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis variabel ketiga menunjukkan bahwa nilai sig 0,238 yang berarti > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Manfaat Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Gambaran Umum Penelitian

Penurunan penerimaan pajak tahun 2020 tak lepas dari dampak Pandemi covid19. Berdasarkan data yang diambil dari KPP Pratama Balam Satu, KPP Pratama
Balam Dua, dan KPP Madya Bandar Lampung ditemukan pola yang serupa yaitu
jumlah netto atau penerimaan pajak masing masing KPP tidak memenuhi target
dari tahun 2019-2020. Selain itu, terjadi penurunan persentase pertumbahan
setoran wajib pajak orang pribadi dari tahun 2019-2020. Kondisi jumlah netto
atau penerimaan pajak dan persentase pertumbuhan paling parah terjadi selama
tahun 2020 (masa pandemi). Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan
penerimaan atau netto dan persentase yang cukup meningkat hal ini karena pada
tahun tersebut kondisi ekonomi mulai membaik dan beberapa program pemerintah
seperti vaksin dan bantuan sosial telah diterima oleh masyarakat.

Hal ini karena pada tahun tersebut terjadi pelemahan sektor ekonomi mikro seperti penurunan penghasilan UMKM, beberapa karyawan mendapat PHK secara sepihak dari perusahaan serta naiknya kebutuhan harga pokok menjadikan pengasilan dan daya *saving* wajib pajak orang pribadi mulai menurun. Dampak dari peristiwa ini ialah masyarakat meragukan kemampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah telah meluncurkan program insentif pajak demi meringankan beban wajib pajak selama pandemi, namun salah satu persyaratan wajib pajak mendapat insentif pajak tersebut ialah memiliki penghasilan tetap.

Masalah selanjutnya yang menjadikan penerimaan pajak menurun ialah kurangnya komunikasi pemerintah daerah maupun KPP Bandar lampung tentang pentingnya manfaat pajak demi kesejahteraan umum. Sehingga masyarakat hanya menganggap bahwa membayar pajak sama halnya dengan pemerintah memalak dana dari masyarakat. Oleh karena itu peneliti berusaha menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Bandar Lampung dalam membayar pajak. Sehingga variabel independen yang diujikan dalam penelitian ini adalah kepercayaan kepada pemerintah, insentif pajak dan manfaat pajak. Adapun hasil pengujian masing-masing variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.6.2 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji tabel 4.13 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) variabel kepercayaan kepada pemerintah sebesar 0,000, yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak, maka dapat diperoleh hasil bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Saputri (2019) di kota Surakarta bahwa kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak orang pribadi, yang berarti apabila Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abadan dan Baridwan (2014) yang menyebutkan bahwa kepercaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap integritas, pelayanan, konsistensi dan transparansi yang ditunjukkan oleh otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Begitu juga hasil penelitian oleh Dewi (2019) di kota Tarakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan kepercayaan kepada pemerintah dan kebanggaan nasional, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian lain, dengan indikator yang sama, Kastlunger et al. 2013 menemukan bukti empiris bahwa kekuasaan yang legitimasi memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepercayaan wajib terhadap kepatuhan sukarela. Lebih lanjut Hofmann et al. (2014) dan Gangl, et al. (2015) menemukan hasil bahwa kekuasaan legitemasi berpengaruh pada kepatuhan pajak yang didasarkan pada kepercayaan, kerjasama sukarela dan iklim layanan yang di sediakan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa kekuasaan legitimasi berpengaruh pada kepatuhan sukarela wajib pajak. Jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik, maka keinginan wajib pajak untuk patuh juga

akan bertambah (Gultom, 2016). Sehingga dapat dibuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi.

4.6.3 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) variabel insentif pajak sebesar 0,379 yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima ,sehingga dapat diperoleh hasil bahwa Variabel insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 100 wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Bandar Lampung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Dewi, Widyasari, dan Nataherwin, 2020) bahwa pemberian insentif pajak selama pandemi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian menyanggah hasil penelitian terdahulu oleh Alfina dan Diana (2021) bahwa variabel insentif perpajakan akibat Covid-19 (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (Y) dikarenakan masyarakat kota Malang telah sadar untuk mengambil manfaat dari insentif pajak tersebut.

Insentif pajak adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak — wajib pajak Indonesia di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bentuk insentif yang diberikan yaitu berupa keringanan PPh 21 yang akan ditanggung pemerintah (DTP) dengan ketentuan untuk pegawai dengan penghasilan bruto dibawah 200 juta per tahun. Namun kebijakan tersebut dirasa kurang efektif oleh masyarakat, karena hanya menjangkau golongan pegawai atau pihak yang berpenghasilan tetap.

Hal ini dibuktikan dengan data status pekerjaan utama di Bandar Lampung menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 yaitu pada Februari 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 3,17 juta orang (71,96 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 1,24 juta orang (28,04 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Februari 2021 naik sebesar 2,46 persen poin jika dibandingkan Februari 2020, tetapi apabila dibandingkan Agustus 2020 pekerja informal turun sebesar 0,30 persen poin.

Selain itu rendahnya komunikasi KPP setempat menjadikan beberapa informasi mengenai insentif pajak tidak tersampai pada wajib pajak yang sebenarnya telah memenuhi kualifikasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya program komunikasi persuasi dari KPP setempat untuk memberitahukan informasi tentang insentif pajak. Padahal komunikasi yang baik sering dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas informasi. Kualitas informasi cenderung dapat dilihat dari akurasi, ketepatan waktu, dan kegunaannya. Penelitian oleh (Siahaan, 2012) menunjukkan bahwa kualitas informasi sangat terkait dengan kepercayaan. Sehingga Wajib pajak akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi apabila mereka percaya bahwa informasi yang mereka terima sangat akurat, tepat waktu, dan berguna bagi mereka.

Faktor lain yang menjadikan hasil penelitian ini menolak pengaruh insentif pajak dengan kepatuhan wajib orang pribadi pajak yaitu selama pandemi ini, perekenomian masyarakat bandar Lampung semakin menurun, dengan adanya pemberian insentif, dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi belum tentu sejalan dengan mulus dan lancar, karena ada kendala seperti menurunnya daya beli, serta perubahan pola *spending-saving* dalam masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

Apabila daya beli menurun, maka permintaa juga menurun. Selain itu dampak terberat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan penghasilan dari masyarakat berpenghasilan menengah dan menengah ke bawah menurun, dan juga adanya pemutusan hubungan kerja dari beberapa perusahaan sehingga wajib pajak merasa untuk tidak perlu membayar pajak meski mendapat keringanan insentif pajak. Sehingga dapat dibuktikan bahwa pemberian insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi.

4.6.4 Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) variabel insentif pajak sebesar 0,238, yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima

,sehingga dapat diperoleh hasil bahwa Variabel manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 100 wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Bandar Lampung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Masruroh dan Zulaikha ditolak yaitu manfaat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Namun hasil penelitian menyanggah hasil penelitian terdahulu oleh (Latief et al., 2020) bahwa manfaat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Wibowo, 2018). Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat yang berasal dari penyediaan barang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik yang memadai (Anugrah, 2018).

Sedangkan hasil survei oleh Wibowo (2018) pada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak menyebutkan delapan penyebab, tiga diantaranya terkait dengan kepercayaan kepada pemerintah/fiskus. Tiga penyebab itu adalah: "karena mereka mencuri uang saya; karena jika mereka menangkap saya, maka saya dapat menyelesaikannya dan walaupun saya tidak membayar, tidak akan terjadi apa-apa". Hasil survei diatas memiliki indikasi bahwa mereka tidak memahami manfaat pajak guna membentuk kesejahteraan sosial. Salah satu penyebab wajib pajak yang tidak memahami manfaat pajak dikarenakan kurangnya promosi media sosial maupun komunikasi persuasi dari KPP setempat. Sehingga dapat dibuktikan bahwa manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi.